

## Feminisme dan Politik: Mengurai Hambatan dan Peluang Bagi Pemimpin Perempuan

Chandra Dimuka Suharno<sup>1</sup>, Febriani Nurul Awaliah<sup>2</sup>, Farah Salma Rubbiyanti<sup>3</sup>,  
Fawwaz As'ad Rizqullah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: [chandradingkasuharno@gmail.com](mailto:chandradingkasuharno@gmail.com)<sup>1</sup>, [febrianiurulawaliah@gmail.com](mailto:febrianiurulawaliah@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[farahsalmarubbiyanti@gmail.com](mailto:farahsalmarubbiyanti@gmail.com)<sup>3</sup>, [fawwazaadrizqullah@gmail.com](mailto:fawwazaadrizqullah@gmail.com)<sup>4</sup>

Alamat: Jl. A. H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Bandung, Jawa Barat, 40614

**Abstract.** *The goal of the social, political, and intellectual movement known as feminism is to eliminate gender-based inequalities. Participation that forms gender stereotypes about women's issues and politics in general includes women's political rights. Research Methods This article To investigate the potential and challenges faced by women political leaders from a feminist perspective, this study uses qualitative techniques with a case study design. stereotype is when a person or group of people are given certain characteristics based on subjective classifications simply because they belong to a particular group (in-group or out-group), which can be positive or negative. The dual role of women in Indonesian politics is complicated, they often have to balance their responsibilities as housewives with their political roles as activists or leaders. The theoretical analysis that has been given states that the theory of violation of expectations describes a situation where an individual has expectations or hopes for the nonverbal behavior of others. Stereotypes are perceptions or beliefs about groups or people that are based on pre-existing opinions and attitudes.*

**Keywords:** *Women, Feminism, Politics*

**Abstrak.** Tujuan dari gerakan sosial, politik, dan intelektual yang dikenal sebagai feminisme adalah untuk menghapuskan kesenjangan berdasarkan gender. Partisipasi yang membentuk stereotip gender tentang isu-isu perempuan dan politik secara umum mencakup hak-hak politik perempuan. Metode Penelitian Artikel ini Untuk menyelidiki potensi dan tantangan yang dihadapi para pemimpin politik perempuan dari sudut pandang feminis, penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan desain studi kasus. stereotip adalah ketika seseorang atau sekelompok orang diberi ciri-ciri tertentu berdasarkan klasifikasi subjektif hanya karena mereka termasuk dalam kelompok tertentu (kelompok dalam atau kelompok luar), yang bisa positif atau buruk. Peran ganda perempuan dalam politik Indonesia rumit mereka sering kali harus menyeimbangkan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dengan peran politik mereka sebagai aktivis atau pemimpin. Analisis teoritis yang telah diberikan menyatakan bahwa teori pelanggaran ekspektasi menggambarkan situasi di mana seorang individu memiliki ekspektasi atau harapan terhadap perilaku nonverbal orang lain. Stereotip adalah persepsi atau keyakinan tentang kelompok atau orang yang didasarkan pada opini dan sikap yang sudah ada sebelumnya.

**Kata kunci:** Perempuan, Feminisme, Politik

### 1. LATAR BELAKANG

Partisipasi yang membentuk stereotip gender tentang isu-isu perempuan dan politik secara umum mencakup hak-hak politik perempuan. Selain harapan yang sangat tinggi yang diberikan kepada perempuan untuk dapat memegang otoritas dan

---

*Received: November 12, 2024; Revised: November 18, 2024; Accepted: Desember 6, 2024; Online Available: Desember 13, 2024; Published: Januari 2, 2025;*

\*Corresponding author, e-mail address

berpartisipasi dalam kekuasaan, mereka juga dianggap tidak layak untuk memasuki ranah politik, khususnya dalam peran kepemimpinan (Wahyudi, 2018). Keterwakilan perempuan dapat mempercepat pengetahuan tentang kebutuhan dan kepentingan serta memberikan suara bagi pendapat perempuan, oleh karena itu perlu untuk meningkatkan ruang publik dan arena politik lainnya untuk partisipasi perempuan (Zulkarnain, 2016).

Tujuan dari gerakan sosial, politik, dan intelektual yang dikenal sebagai feminisme adalah untuk menghapuskan kesenjangan berdasarkan gender. Feminisme mempromosikan partisipasi perempuan dalam politik sebagai pemimpin dengan hak dan kemampuan yang sama untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan. Meskipun demikian, meskipun ada kemajuan, norma budaya patriarki, stereotip gender, dan akses terbatas ke sumber daya politik terus menjadi hambatan utama bagi partisipasi politik perempuan.

Berkat keterampilan dan belas kasihnya yang luar biasa selama konflik antara Ali dan Muawwiyah, kaum perempuan telah membantu pasukan dalam diplomasi sepanjang sejarah Islam, khususnya di bidang politik (Nurhikmah, 2014). Hal ini menunjukkan validitas hak politik perempuan dan keberadaan realitas, tetapi juga menyoroti dampak peran gender yang ketat, yang berkontribusi terhadap ketidakadilan sosial dan ketidaksetaraan gender. Dinamika pembangunan nasional dapat dipengaruhi oleh ketidaksetaraan gender, karena baik laki-laki maupun perempuan akan terkena dampak sebagai penerima hasil pembangunan dan sebagai pemangku kepentingan di pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat. Suharjudi (2020).

Budaya patriarki yang mengakar di Indonesia dan masih menjadi bagian dari struktur sosial turut menyumbang pada ketimpangan gender. Budaya ini memengaruhi banyak aspek dan ranah yang berbeda, termasuk politik, ekonomi, pendidikan hukum, dan sebagainya. Inilah yang melatarbelakangi munculnya isu-isu sosial yang membatasi kebebasan perempuan dan melanggar hak-hak mereka yang seharusnya menjadi hak mereka. Ada banyak pengaruh tradisional yang turut menyebabkan hal ini, termasuk terlalu domestik terhadap perempuan, hukum yang longgar, dan ketimpangan gender (Sakina & Ade, 2017). Inilah yang menjadi kekuatan pendorong di balik keyakinan yang dianut banyak feminis bahwa budaya patriarki masih menempatkan perempuan dalam perbudakan.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi nuansa hubungan antara feminisme dan politik, dengan fokus pada kesulitan yang dihadapi perempuan dalam posisi kepemimpinan politik dan peluang yang dapat mereka ambil untuk meningkatkan status mereka.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Salah satu isu yang sudah lama ada dalam peradaban Barat adalah pemikiran politik mengenai kesetaraan gender. Menurut V. Spike Peterson dan Anne Sisson Runyan, kesenjangan gender masih disebabkan oleh prakonsepsi gender. Menurut budaya Barat, menjadi seorang pria dikaitkan dengan menjadi intelektual, dan wanita bersifat emosional dan tidak rasional. Dengan membatasi hak kewarganegaraan melalui berbagai strategi, hegemoni maskulin mengisolasi wanita dari lembaga politik formal. Feminisme menanggapi kampanye politik dengan dua cara: dengan mengekspresikan partisipasi politik perempuan di luar lembaga formal, ia memperluas pengertian politik dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga politik resmi.

Menurut Judith Squires, Anne Philip mencantumkan empat alasan mengapa perempuan harus memiliki akses yang sama terhadap politik formal: pertimbangan tentang panutan; pertimbangan tentang keadilan; pertimbangan tentang stereotip gender yang mewakili persepsi dan gagasan tentang perilaku apa yang terbaik bagi perempuan; dan pertimbangan untuk menghidupkan kembali demokrasi.

Pertama adalah panutan, yang didasarkan pada gagasan bahwa kehadiran representasi perempuan mendorong pengembangan keyakinan bahwa mereka mampu memenuhi posisi tersebut. Kedua, kesetaraan ditunjukkan oleh fakta bahwa laki-laki dan perempuan terwakili secara setara di badan legislatif. Ketiga adalah kepentingan perempuan. Untuk mempertahankan hak-hak mereka, perempuan harus memasuki ranah politik. Oleh karena itu, selain keberadaan mereka, pilihan yang mereka buat dan kebijakan yang mereka kembangkan sangat penting. Keempat, menghidupkan kembali demokrasi dengan menyarankan agar perempuan mengambil peran kepemimpinan karena mereka dapat memanfaatkan politik dengan berbagai cara, yang akan meningkatkan cara ruang publik dibentuk.

Berbeda dengan argumen keadilan, yang menekankan perempuan sebagai warga negara dan anggota kelompok, perempuan lebih mampu memperjuangkan kebutuhan dan

kepentingan mereka sendiri. Dengan kata lain, perempuan memiliki kepentingan unik yang tidak dapat diwakili secara memadai oleh laki-laki. Akibatnya, pemilihan perempuan menjamin bahwa kepentingan mereka terwakili.

Ada dua aspek hierarki dan dikotomi gender. Pertama, istilah maskulin dan feminin didefinisikan secara kontras satu sama lain, bukan sebagai kategori yang otonom. Keuntungan satu pihak merupakan kerugian pihak lain. Dalam masyarakat Barat, menjadi seorang pria dikaitkan dengan sifat-sifat seperti keras kepala dan akal sehat. Pasif, sensitif, dan emosional merupakan karakteristik yang dikaitkan dengan kewanitaan.

Kedua, nilai maskulinitas lebih tinggi daripada feminitas. Kata ini menunjukkan dualitas dan menciptakan struktur hierarki yang tidak adil. Secara tradisional, perempuan dikaitkan dengan pengasuhan anak, pengasuhan anak, dan tugas-tugas rumah tangga, sedangkan laki-laki dikaitkan dengan mencari nafkah, kecakapan fisik, prestasi akademis, dan aktivisme politik. Pandangan feminis liberal, Marxis, sosialis, dan radikal termasuk di antara pandangan yang membahas isu gender. Gagasan ini berfungsi sebagai landasan untuk memikirkan teori gender.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini untuk menyelidiki potensi dan tantangan yang dihadapi para pemimpin politik perempuan dari sudut pandang feminis, penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan desain studi kasus. Perempuan yang memegang posisi kepemimpinan politik, termasuk anggota parlemen, kepala daerah, pemimpin partai politik, dan aktivis yang berkonsentrasi pada isu gender dan politik, menjadi subjek penelitian untuk penelitian ini, yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia di mana perempuan terwakili dalam politik. Wawancara semi-terstruktur yang mendalam, analisis dokumen resmi, dan observasi partisipan terhadap aktivitas politik perempuan seperti kampanye atau diskusi kebijakan digunakan untuk mengumpulkan data. Aplikasi perekam suara, catatan lapangan, dan protokol wawancara adalah contoh alat penelitian. Metode tematik digunakan untuk memeriksa data, dimulai dengan transkripsi data, pengkodean awal, dan pengelompokan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hambatan bagi Pemimpin Perempuan dalam Politik**

###### **1) Stereotype**

Stereos, yang berarti padat-kaku, dan typos, yang berarti model, adalah dua kata Yunani yang digabungkan untuk membentuk kata stereotype. Amanda melanjutkan dengan mengatakan bahwa stereotip adalah ketika seseorang atau sekelompok orang diberi ciri-ciri tertentu berdasarkan klasifikasi subjektif hanya karena mereka termasuk dalam kelompok tertentu (kelompok dalam atau kelompok luar), yang bisa positif atau buruk. Persepsi yang kita ciptakan tergantung pada sudut pandang dan pendidikan budaya kita adalah dasar dari stereotip. Selain itu, alih-alih datang langsung dari sumbernya, stereotip dihasilkan oleh cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Stereotip sering dikaitkan dengan ciri-ciri yang dapat dikenali. Ciri-ciri yang kita kenali sering dipilih secara acak.

Ini menyiratkan bahwa manusia mampu mengabaikan ciri-ciri tertentu sambil mengenali ciri-ciri lainnya. Generalisasi yang dibuat tentang anggota suatu kelompok dikenal sebagai stereotip. Menurut buku "*Social Psychology*" karya Franzoi, stereotip adalah opini tentang kelompok tertentu. Stereotip adalah ide-ide sosial yang biasanya diperoleh dari orang lain dan dipertahankan melalui interaksi sosial yang sering. Stereotip adalah persepsi atau keyakinan tentang kelompok atau orang yang didasarkan pada opini dan sikap yang sudah ada sebelumnya, menurut A. Samovar & E. Porter dalam Mulyana (2000: 218). Ide ini mengarah pada penilaian yang biasanya tidak menguntungkan dan bahkan meremehkan. Stereotip negatif dan penghinaan terhadap kelompok lain merupakan salah satu masalah yang perlu ditangani karena ada kecenderungan untuk memberi label tertentu pada kelompok tertentu. Dengan menggunakan ide model memori gandanya, Philippot mengklaim bahwa regulasi emosional dapat dicapai secara tidak langsung dengan melakukan putaran umpan balik yang mempertahankan dan meningkatkan aktivasi skema. Ia mengklaim bahwa regulasi emosi mencakup semua domain kognitif penting, termasuk persepsi, perhatian, memori, pengambilan keputusan, dan kesadaran.

Ketika bayi akhirnya membentuk skema gender tentang apa yang sesuai dan tidak sesuai gender dalam budaya mereka, kategorisasi gender pun berkembang, menurut teori skema gender, yang kini menjadi teori kognitif gender yang paling

umum dikenal. Skema adalah jaringan hubungan dan struktur kognitif yang mengarahkan pandangan seseorang. Dunia dibagi menjadi kategori laki-laki dan perempuan berdasarkan skema gender. Anak-anak memiliki dorongan bawaan untuk melihat dunia dan berperilaku sesuai dengan skema mereka yang terus berkembang.

Kita harus memberikan informasi yang akurat mengenai berbagai item yang berkaitan dengan ras, suku, agama, dan antar agama ketika membahas masalah budaya di negara ini. Kehadiran individu dalam suatu kelompok sering kali diklasifikasikan. Myers dalam Hanurawan & Diponegoro, menegaskan bahwa stereotip adalah jenis kepercayaan yang dipegang oleh seorang individu atau kelompok mengenai karakteristik kelompok tertentu. Stereotip, menurut Sherif & Sherif dalam Sobur, adalah konsensus di antara anggota kelompok tentang bagaimana kelompok lain dan anggotanya harus dipersepsikan. Kecenderungan seorang individu atau organisasi untuk memberikan gambaran atau konsep fiktif. Stereotip adalah pandangan atau kepercayaan tentang suatu kelompok atau individu yang didasarkan pada sikap dan pendapat yang sudah ada sebelumnya, menurut A. Samovar & E. Porter dalam Mulyana, Stereotip tentang Narwoko dan Suyanto melibatkan pemberian label kepada pihak atau kelompok tertentu, yang selalu mengarah pada ketidakadilan dan cedera pada orang lain.

Stereotip gender yang menganggap bahwa perempuan tidak layak untuk memimpin atau menduduki posisi penting merupakan salah satu hambatan terbesar yang dihadapi perempuan dalam politik. Gagasan bahwa perempuan harus menjadi ibu rumah tangga dan bukan pemimpin politik dipupuk oleh stereotip ini. Peluang perempuan untuk maju dalam politik sering kali dibatasi oleh gagasan ini.

## **2) Peran Ganda Perempuan Dalam Politik Indonesia**

Peran ganda perempuan dalam politik Indonesia rumit; mereka sering kali harus menyeimbangkan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dengan peran politik mereka sebagai aktivis atau pemimpin. Perempuan yang aktif berpolitik di Indonesia sering kali menghadapi ekspektasi sosial dan budaya bahwa mereka harus mampu memenuhi tanggung jawab rumah tangga di rumah sambil terus mengejar karier di bidang politik. Mengingat bahwa akses dan kemungkinan perempuan sering kali tidak proporsional dengan apa yang diharapkan masyarakat dari mereka, hal ini

dapat menjadi hambatan yang signifikan. Perempuan yang terjun ke dunia politik, misalnya, sering kali merasa sulit untuk mengabdikan diri sepenuhnya pada karier politik mereka karena tekanan sosial untuk mempertahankan peran ideal dalam masyarakat dan di rumah.

Selain itu, perempuan harus berjuang untuk mendapatkan posisi dalam politik Indonesia yang didominasi oleh laki-laki. Peran ganda ini terkait dengan kurangnya dukungan untuk infrastruktur politik yang ramah perempuan, seperti aturan cuti atau dukungan logistik untuk perempuan dengan anak kecil, dan bukan hanya sekadar menyeimbangkan waktu antara pekerjaan politik dan keluarga. Perempuan sering kali berjuang untuk mencapai keseimbangan antara tanggung jawab pribadi dan politik mereka, terutama jika mereka tidak memiliki akses yang tepat terhadap dukungan dan sumber daya. Kendala ini sering kali memaksa perempuan untuk memutuskan antara tinggal di rumah dan memajukan karier politik mereka, yang pada akhirnya dapat membatasi kapasitas mereka untuk memimpin.

Selain itu, perempuan harus berjuang untuk mendapatkan posisi dalam politik Indonesia yang didominasi oleh laki-laki. Peran ganda ini terkait dengan kurangnya dukungan untuk infrastruktur politik yang ramah perempuan, seperti aturan cuti atau dukungan logistik untuk perempuan dengan anak kecil, dan bukan hanya sekadar menyeimbangkan waktu antara pekerjaan politik dan keluarga. Perempuan sering kali berjuang untuk mencapai keseimbangan antara tanggung jawab pribadi dan politik mereka, terutama jika mereka tidak memiliki akses yang tepat terhadap dukungan dan sumber daya. Kendala ini sering kali memaksa perempuan untuk memutuskan antara tinggal di rumah dan memajukan karier politik mereka, yang pada akhirnya dapat membatasi kapasitas mereka untuk memimpin.

### **3) Hak Politik Perempuan (Kendalanya)**

Analisis teoritis yang telah diberikan menyatakan bahwa teori pelanggaran ekspektasi menggambarkan situasi di mana seorang individu memiliki ekspektasi atau harapan terhadap perilaku nonverbal orang lain. Norma sosial atau pengalaman sebelumnya dengan perilaku orang yang kita kenal membentuk dasar ekspektasi individu terhadap perilaku nonverbal orang lain.

Ada beberapa alasan mengapa perempuan menghadapi hambatan dalam ranah politik, antara lain: 1. Konstruksi sosial, perempuan harus mampu menghilangkan mitos bahwa mereka hanya mampu melakukan pekerjaan rumah tangga untuk memasuki ranah politik. Perempuan dianggap oleh masyarakat umum sebagai sosok yang sensitif, baik hati, lembut, penyayang, dan empati. Di sisi lain, laki-laki dicirikan sebagai sosok yang tegas, logis, dan mampu berpikir analitis dan logis. Struktur masyarakat harus diubah untuk memberi perempuan kesempatan berpartisipasi dalam politik. Sejak era reformasi, peraturan formal yang berkaitan dengan partisipasi perempuan telah diberlakukan. Janji dan kesempatan untuk berpartisipasi

Undang-undang telah menetapkan aturan yang jelas bagi perempuan; yang dibutuhkan hanyalah masyarakat dan perempuan untuk lebih transparan sehingga mereka dapat menunjukkan keterampilan dan kemampuan mereka di bidang politik dan bahkan naik ke posisi kepemimpinan baik di dalam negeri maupun global. 2. Membangun dukungan partai politik: Ketika undang-undang yang eksplisit mengatur kuota pencalonan berlaku, perempuan dapat memasuki bidang politik. Adanya pembatasan ini telah mendorong tanggapan dari para pegiat perempuan. Namun, dalam praktiknya, perempuan sering diposisikan di bagian bawah partai politik (Sulastri, 2020). Partai politik menentukan nomor suara kandidat, melaksanakan rencana berdasarkan tujuan partai politik yang diprioritaskan untuk menduduki kursi DPRD atau DPR, serta dukungan pemilih potensial. Hal ini menunjukkan bahwa Suara diperoleh dengan menggunakan prioritas nomor suara. Dalam peradaban, patriarki masih sangat kuat, sehingga partai politik menggunakan ini untuk menempatkan laki-laki di bagian atas surat suara dalam upaya untuk mengumpulkan sejumlah besar suara dan memenangkan pemilihan umum. 3. Minoritas mental di kalangan perempuan Kurangnya dukungan perempuan dalam memenuhi kuota 30% yang belum tercapai menjadi salah satu tantangan yang mereka hadapi. Perempuan sering kali memiliki minoritas mental akibat kehidupan sehari-hari mereka; jika mereka sudah menikah, mereka tidak boleh mengabaikan peran mereka sebagai istri dan ibu. Oleh karena itu, sektor domestik dianggap lebih cocok bagi perempuan daripada sektor publik.

Menurut Kollo (2017) mengidentifikasi hal-hal berikut sebagai hambatan utama yang dihadapi perempuan dalam politik: Karena politik dipandang sebagai ranah yang sebaiknya diserahkan kepada laki-laki, perempuan kurang tertarik pada

politik dibandingkan laki-laki. Hal ini karena ada perbedaan antara kehidupan domestik dan publik. Perempuan menghadapi keadaan marginalisasi politik, seperti dikecualikan dari pengambilan keputusan, ketika mereka ingin mengejar karier di bidang politik. Keterlibatan perempuan dengan emosi berkontribusi pada kurangnya pemahaman politik mereka, karena politik membutuhkan pemikiran yang logis. Akibatnya, perempuan cenderung tidak menggunakan tindakan afirmatif, yang menurunkan keterlibatan politik mereka.

### **Peran Perempuan dalam Membawa Perubahan bagi Politik**

Keterlibatan politik perempuan semakin diterima di seluruh dunia, dan organisasi internasional bahkan mulai mendorongnya. Peran perempuan harus ditingkatkan. Partisipasi perempuan dalam politik telah mengurangi kesenjangan gender dan Dampaknya mulai terlihat jika Perempuan semakin banyak memegang posisi penting dalam pemerintahan. Akibatnya, kebijakan kualitas hidup diperluas, dan ada prioritas kebijakan untuk keluarga, perempuan, perbedaan etnis, dan hak-hak ras minoritas.

Selain itu, menurut Institut Demokrasi Nasional, berdasarkan temuan penelitiannya di lebih dari 100 negara di seluruh dunia, diketahui bahwa perempuan memprioritaskan kesehatan, pendidikan, dan indikator pembangunan penting lainnya, sangat tanggap terhadap kepentingan konstituen, berkontribusi dalam mengamankan perdamaian abadi, dan menumbuhkan kepercayaan warga negara terhadap demokrasi melalui partisipasi langsung.

Menerima keinginan perempuan untuk pengakuan hak-hak mereka. Pemerintah setiap negara juga harus mendorong partai politiknya untuk menambah lebih banyak perempuan dalam daftar kandidatnya. Peningkatan pendidikan bagi perempuan dan pemahaman tentang hak-hak politik mereka—yang setara dengan hak-hak laki-laki—juga harus dipromosikan oleh pemerintah. Partai politik yang mendukung dapat berfungsi sebagai saluran bagi keterlibatan politik perempuan. Lebih jauh, dukungan pemerintah untuk politisi perempuan harus berupa bantuan keuangan selain dukungan emosional, yang akan membantu mereka menjadi lebih mandiri dan tidak merasa dibatasi oleh politisi laki-laki. Partai politik akan lebih

bersemangat untuk memasukkan lebih banyak perempuan dalam struktur partai mereka sebagai hasil dari hal ini terus berkembang dalam bidang politik.

Perempuan telah lama memperjuangkan kesetaraan gender, namun hal itu masih belum ideal. Pemerintah diharapkan untuk secara konsisten mendukung partisipasi aktif perempuan dalam lembaga-lembaga pemerintah, yang saat ini jauh kurang maju dibandingkan dengan laki-laki. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis yang menjunjung tinggi hak-hak semua warga negaranya, tanpa memandang jenis kelamin, budaya emansipasi tidak boleh dilonggarkan dan harus selalu dikembangkan.

Perempuan telah berkontribusi pada sejumlah perbaikan yang bermanfaat dalam politik global. Penulis akan secara eksplisit mengkaji studi kasus tentang reformasi yang dilaksanakan oleh politisi lokal dan internasional, seperti Margaret Thatcher, Angela Merkel, dan Tri Rismaharini, dalam bagian ini. Tiga dari empat perempuan akan dibahas dalam artikel ini, bersama dengan evolusi keterlibatan perempuan dalam politik sepanjang masa. Seperti diketahui, kesetaraan gender dalam politik belum tercapai di Indonesia pada saat Thatcher terpilih dan berkuasa. Dalam contoh ini, Margaret Thatcher akan menggambarkan bagaimana Gelombang Kedua Feminisme menandai dimulainya normalisasi peran politik perempuan, sementara Angela Merkel dan Tri Rismaharini akan menggambarkan bagaimana peran perempuan dalam politik didukung oleh globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini.

Di bawah kepemimpinan Angela Merkel, Jerman telah menjadi lebih kuat secara politik dan ekonomi sejak pemilihannya pada tahun 2005. Delapan kali, majalah Forbes telah menobatkan Merkel sebagai Wanita Paling Berpengaruh di Dunia. Tentu saja, ada alasan yang tepat mengapa majalah Forbes memilih kandidat tersebut. Angela Merkel telah menerapkan sejumlah kebijakan yang mempromosikan kesejahteraan sosial, seperti meningkatkan upah minimum dan mengurangi jam kerja yang diperlukan, dalam upaya untuk mengatasi masalah dalam negeri seperti angka kelahiran yang rendah. Inisiatif Merkel telah berhasil dalam mempromosikan kesejahteraan sosial dan meningkatkan angka kelahiran. Perkembangan mengejutkan lainnya adalah bahwa Jerman mampu mengatasi krisis moneter Eropa karena inisiatif Angela Merkel. Kenyataannya, Jerman mengalami surplus dalam perekonomiannya sementara negara-negara lain menghadapi tantangan. Jerman telah menjadi pemain

kunci dalam Dewan Uni Eropa dengan memperkuat perekonomiannya selama masa krisis di negara-negara Eropa lainnya. Setiap pilihan yang dibuat Merkel tampaknya merupakan arahan yang harus diikuti oleh semua pihak. Tidak diragukan lagi bahwa kontribusi signifikan Merkel terhadap Uni Eropa menawarkan banyak keuntungan bagi Jerman dalam politik internasional.

### **Kepemimpinan yang Berorientasi pada Inklusivitas dan Kesejahteraan**

Pemimpin perempuan sering kali membawa perspektif yang lebih inklusif, berorientasi pada kesejahteraan, dan berbasis pada keadilan sosial. Mereka cenderung lebih fokus pada isu-isu yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks ini, perempuan memiliki potensi untuk menghadirkan perubahan yang lebih berdampak pada peningkatan kualitas hidup rakyat.

Inklusivitas dalam Pengambilan Keputusan Pemimpin perempuan cenderung lebih sensitif terhadap keberagaman dalam masyarakat dan memahami pentingnya memasukkan suara dari semua kelompok, terutama yang sering terpinggirkan, seperti perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. Dalam dunia politik yang sering didominasi oleh pemimpin laki-laki, pemimpin perempuan memiliki kemampuan untuk merangkul semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Mereka lebih terbuka untuk mendengarkan berbagai sudut pandang dan berusaha untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi seluruh lapisan masyarakat. Inklusivitas ini sering kali tercermin dalam kebijakan yang mendukung akses yang setara untuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau gender.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Stereos, yang berarti padat-kaku, dan typos, yang berarti model, adalah dua kata Yunani yang digabungkan untuk membentuk kata stereotype. stereotip adalah ketika seseorang atau sekelompok orang diberi ciri-ciri tertentu berdasarkan klasifikasi subjektif hanya karena mereka termasuk dalam kelompok tertentu (kelompok dalam atau kelompok luar), yang bisa positif atau buruk.

Peran ganda perempuan dalam politik Indonesia rumit; mereka sering kali harus menyeimbangkan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dengan peran politik mereka sebagai aktivis atau pemimpin. Perempuan yang aktif berpolitik di Indonesia sering kali menghadapi ekspektasi sosial dan budaya bahwa mereka harus mampu memenuhi tanggung jawab rumah tangga di rumah sambil terus mengejar karier di bidang politik. Perempuan telah lama memperjuangkan kesetaraan gender, namun hal itu masih belum ideal. Pemerintah diharapkan untuk secara konsisten mendukung partisipasi aktif perempuan dalam lembaga-lembaga pemerintah, yang saat ini jauh kurang maju dibandingkan dengan laki-laki.

Kepemimpinan yang berorientasi pada inklusivitas dan kesejahteraan pemimpin perempuan sering kali membawa perspektif yang lebih inklusif, berorientasi pada kesejahteraan, dan berbasis pada keadilan sosial. Mereka cenderung lebih fokus pada isu-isu yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Aziz, Y. M. (2016). *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV pustaka setia.
- Budiman, K. (2020). *Gender dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Fakih, M. (2012). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press.
- Fauziah, R. (2019). *Feminisme dan Politik: Menyuarakan Pemimpin Perempuan dalam Dunia Politik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rinaldi, H. (2021). *Feminisme, Politik, dan Kuota Gender: Kajian Kritis tentang Peran Perempuan di Parlemen*. Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga.
- Sari, M. D. (2020). *Kepemimpinan Perempuan dalam Dunia Politik: Peluang dan Hambatan*. Bandung: Pustaka Belajar.
- Suryakusuma, J. (2011). *State Ibuism: Ideologi Gender di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.